

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diplomasi merupakan instrumen utama dalam politik luar negeri suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di dunia internasional (Berridge, 2010). Secara konvensional, diplomasi dapat dimaknai sebagai interaksi formal yang dilakukan oleh perwakilan negara, dan biasanya melalui lembaga kementerian luar negeri dan dilakukan dalam forum bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan politik dan menjaga hubungan antarnegara (Baylis, Smith, & Owens, 2008). Pendekatan ini dikenal sebagai *first track diplomacy*, yaitu diplomasi antar aktor resmi negara (state-to-state), yang selama bertahun-tahun menjadi corak utama hubungan internasional modern. Berridge dan James (2003) juga menyebutkan bahwa diplomasi adalah praktik manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang dilakukan oleh agen resmi suatu negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan struktur kekuasaan global, meningkatnya interdependensi ekonomi, serta munculnya isu-isu global seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, telah memperluas makna diplomasi ke ranah ekonomi.

Namun, seiring berkembangnya dinamika global, praktik diplomasi turut mengalami perluasan fungsi dan strategi. Meskipun bentuk-bentuk baru diplomasi mulai muncul, negara tetap menjadi aktor utama dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, *first track diplomacy*, yakni diplomasi yang dijalankan secara formal oleh pemerintah melalui institusi negara seperti kementerian luar negeri dan perwakilan diplomatik masih menjadi jalur dominan dalam interaksi antarnegara. Salah satu bentuk dari praktik diplomasi negara yang semakin menonjol dalam era ekonomi global saat ini adalah *economic diplomacy*, yaitu diplomasi yang berfokus pada pencapaian kepentingan ekonomi nasional melalui penguatan hubungan dagang, promosi investasi, dan kerja sama ekonomi internasional (Okano-Heijmans, 2011).

Pada konsep diplomasi ekonomi atau *economic diplomacy*, yakni strategi diplomatik negara yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Bayne dan Woolcock (2007) mendefinisikan *economic diplomacy* sebagai kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk memengaruhi kebijakan ekonomi internasional dan mendukung pelaku ekonominya dalam arena global. Maaike Okano-Heijmans (2011) lebih lanjut menjelaskan bahwa *economic diplomacy* merupakan gabungan dari berbagai praktik seperti negosiasi perdagangan, fasilitasi investasi, serta kerja sama pembangunan yang semuanya bertujuan memperkuat posisi ekonomi negara dalam hubungan internasional. Dalam praktiknya, institusi-institusi seperti kementerian luar negeri, kedutaan besar, dan lembaga promosi investasi menjadi aktor utama dalam mengimplementasikan strategi ini.

Economic diplomacy tidak berdiri sebagai satu entitas tunggal, melainkan terdiri dari tiga elemen utama yang saling terkait. Maaike Okano-Heijmans (2011) menyebut konfigurasi ini sebagai *trinity in economic diplomacy*, yaitu *trade diplomacy*, *commercial diplomacy*, dan *development cooperation*. Ketiganya mewakili bentuk-bentuk keterlibatan negara dalam mendukung aktivitas ekonomi internasional. *Trade diplomacy* berfokus pada negosiasi perjanjian perdagangan internasional dan penghapusan hambatan tarif. *Commercial diplomacy* merujuk pada dukungan aktif pemerintah terhadap perusahaan domestik dalam bentuk advokasi bisnis, promosi ekspor, dan fasilitasi investasi. Sementara itu, *development cooperation* menggambarkan upaya negara dalam memberikan atau menerima kerja sama pembangunan yang bersifat ekonomi, baik melalui bantuan teknis, investasi pembangunan infrastruktur, maupun kemitraan strategis jangka panjang.

Dengan semakin terintegrasinya ekonomi global, praktik *economic diplomacy* menjadi semakin penting bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat daya saing dan menarik investasi asing. Bahkan, seperti dijelaskan dalam *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, aktor diplomasi ekonomi kini mencakup tidak hanya negara-negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang dan transisi yang menggunakan diplomasi ekonomi sebagai alat untuk memperkuat posisi

internasional mereka (Cooper, Heine, & Thakur, 2013). Dalam proses ini, negara tetap menjadi aktor utama, meskipun pada praktiknya dapat melibatkan banyak aktor pendukung dari sektor swasta maupun masyarakat sipil.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian yang berlandaskan pada kerangka *economic diplomacy* memiliki relevansi tinggi untuk mengkaji bagaimana strategi diplomatik negara digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, memperluas jejaring perdagangan, serta menjaga stabilitas nasional dalam konteks global yang terus berubah.

Salah satu negara yang menonjol dalam menerapkan pendekatan *economic diplomacy* secara fleksibel dalam kebijakan luar negerinya adalah Vietnam. Sejak era reformasi ekonomi *Đổi Mới* pada akhir 1980-an, Vietnam telah berupaya memadukan prinsip politik yang bersifat lentur dengan strategi pertumbuhan ekonomi terbuka. Hal ini tercermin dalam pendekatan yang kemudian dikenal sebagai prinsip diplomasi bambu, yang di definisikan sebagai sebuah filosofi atau prinsip diplomasi khas Vietnam yang dianalogikan seperti pohon bambu: kuat di akar (ideologi), fleksibel dalam batang (kebijakan), dan lentur terhadap perubahan arah angin geopolitik (Trong, 2021). Prinsip ini menekankan keseimbangan antara keteguhan ideologi nasional dan kelenturan dalam membangun hubungan internasional yang pragmatis (Thayer, 2022).

Prinsip diplomasi bambu ini pertamakali diperkenalkan oleh Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam pada tahun 2016 dalam pidato nya di *29th Diplomatic Conference* di Hanoi (Trong, 2016). Saat itu, Nguyen Phu Trong juga menekankan pentingnya prinsip diplomasi ini dalam menjaga perdamaian, mencegah konflik internasional, dan membina kerjasama internasional dalam dinamika hubungan antar negara yang seringkali berubah dengan cepat. Penerapan prinsip diplomasi bambu ini juga mencerminkan ajaran mantan presiden sekaligus mantan pemimpin partai komunis Ho Chi Minh yang menggambarkan bambu sebagai metafora untuk mendeskripsikan fleksibilitas, ketahanan dan

kekuatan bangsa Vietnam dalam menghadapi dinamika dunia internasional (Thayer, 2022; Communist Review, 2021).

Sejarah penerimaan investasi asing langsung (*foreign direct investment* atau FDI) di Vietnam tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi besar yang dikenal sebagai *Đổi Mới* (restorasi) yang dicanangkan pada tahun 1986. Reformasi ini menandai transformasi Vietnam dari sistem ekonomi terpusat ala sosialis menuju model ekonomi pasar berorientasi sosialisme, yang membuka pintu terhadap keterlibatan investor asing dan kerja sama ekonomi internasional (Tuan, 2024).

Barulah pada tahun 2016, ketika Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong memperkenalkan konsep diplomasi bambu, arah kebijakan luar negeri Vietnam mulai menunjukkan strategi diplomasi yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika global. Diplomasi bambu menambahkan dimensi normatif dan filosofis ke dalam praktik hubungan internasional Vietnam, termasuk dalam kerangka kerja sama ekonomi dan investasi. Sejak saat itu, Vietnam tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Tiongkok dan Korea Selatan, tetapi juga menjalin kemitraan strategis yang lebih erat dengan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa dalam urusan hubungan dagang dan investasi (ASEAN, 2023; Ministry of Planning and Investment, 2023) .

Pada tahun 2024, negara sumber/mitra FDI terbesar ke Vietnam adalah Singapura (Saigon Giai Phong, 2024), yang banyak menanamkan modal pada sektor properti, logistik, dan energi terbarukan. Korea Selatan juga merupakan investor besar, sebagian besar terpusat pada industri pemrosesan dan manufaktur, yang mencakup lebih dari 70 persen portofolio investasinya. Selain itu, sektor real estate juga mencakup lebih dari 12 persen investasi (Vietnam Briefing, 2024). Hong Kong dan Tiongkok mendominasi dalam sektor perdagangan dan infrastruktur, meskipun hubungan politik antara Vietnam dan Tiongkok sering diwarnai ketegangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Di sisi lain, Jepang tetap menjadi mitra strategis yang konsisten dalam mendukung proyek infrastruktur dan

manufaktur berteknologi tinggi (Vietnam Investment Review, 2024). Belanda dan Amerika Serikat juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal, khususnya di sektor teknologi dan energi terbarukan (Vietnam Plus, 2024). Keberhasilan ini mencerminkan implementasi strategi *economic diplomacy* dan *commercial diplomacy* Vietnam yang fleksibel dan adaptif, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi investasi utama di kawasan Asia Tenggara.

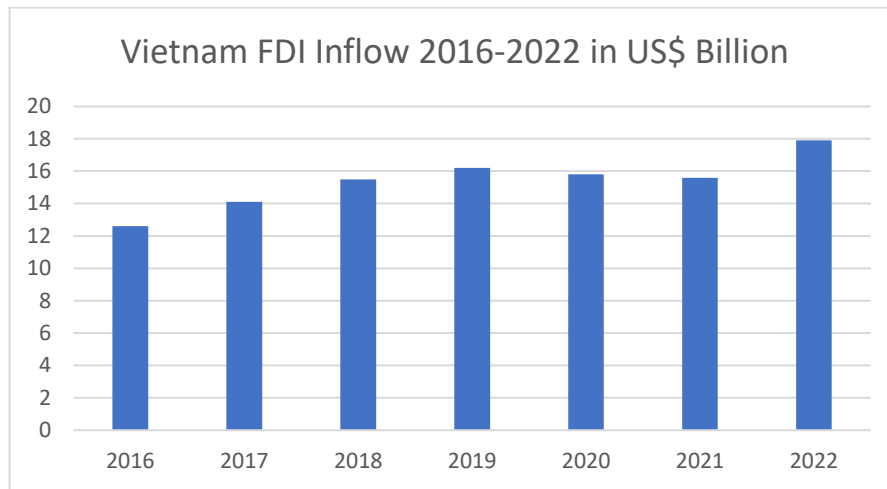
Vietnam terbukti mampu menjaga kestabilan dan pertumbuhan FDI bahkan di tengah tantangan global seperti perang dagang antara AS-Tiongkok dan pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, realisasi FDI Vietnam mencapai lebih dari 25 miliar dollar AS, menjadikannya salah satu penerima investasi asing terbesar di Asia Tenggara (McKinsey, 2025). Ini menegaskan bahwa strategi diplomasi yang lentur namun berakar kuat pada kepentingan nasional, sebagaimana diusung oleh prinsip diplomasi bambu yang berhasil menciptakan ruang aman bagi Vietnam dalam menghadapi dinamika geopolitik sambil tetap fokus pada pembangunan ekonomi domestik.

Diplomasi bambu menekankan prinsip “*kiên định về chiến lược, linh hoạt về sách lược*” yang berarti konsisten dalam strategi, namun fleksibel dalam pelaksanaan. Ini menjadi dasar bagi Vietnam untuk menjaga hubungan seimbang dan saling menguntungkan dengan berbagai kekuatan besar dunia, tanpa harus berpihak secara eksklusif pada salah satu negara. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan “diversifikasi dan multilateralisasi hubungan luar negeri” yang terus diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Vietnam (Vietnam Embassy USA, 2025).

Penerapan prinsip ini sangat terlihat dalam hubungan perdagangan Vietnam dengan dua kekuatan ekonomi besar dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tahun ini, Vietnam dan Amerika Serikat telah mengadakan putaran kedua negosiasi perdagangan di Washington untuk membahas tarif yang diusulkan sebesar 46% oleh AS terhadap barang-barang Vietnam (Reuters, 2025). Vietnam berupaya mengurangi surplus perdagangannya dengan AS, yang mencapai \$123

miliar pada tahun 2024, dengan membatasi re-ekspor barang-barang China dan meningkatkan pembelian produk-produk Amerika, termasuk energi dan pertanian (Reuters, 2025). Namun, di lain sisi, Tiongkok tetap menjadi salah satu mitra dagang terbesar Vietnam. Kantor Statistik Umum Vietnam, dalam dua bulan pertama tahun 2025 (Januari–Februari), mencatat total nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Tiongkok mencapai lebih dari US\$31 miliar (Vietnam News, 2025). Dari jumlah tersebut, impor dari Tiongkok sebesar US\$23,3 miliar, meningkat 20,7% dari periode sebelumnya (Voice of Vietnam, 2025). Sementara, selama tiga bulan pertama tahun 2025, volume perdagangan bilateral antara Vietnam dan Tiongkok mencapai US\$51,25 miliar, meningkat 17,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Hanh, 2025). Ketangguhan dan fleksibilitas Vietnam dalam menyeimbangkan kepentingan antara dua kekuatan global ini menunjukkan keberhasilan prinsip diplomasi bambu dalam praktik nyata.

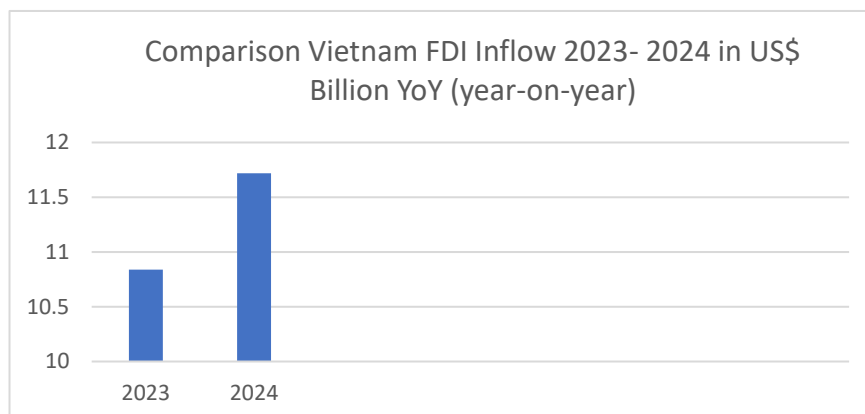
Dalam rentang waktu 2016 hingga 2024, Vietnam menunjukkan peningkatan dalam menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). Bahkan, pencairan FDI Vietnam sempat mencapai titik tertinggi sepanjang masa, yaitu sekitar 25,35 miliar USD pada tahun 2024, peningkatan tahunan sebesar 9,4%, yang juga mencakup 16,5% dari total investasi, sedikit meningkat 0,5 poin persentase dibandingkan dengan angka tahun 2023 (Vietnam Investment Review, 2025). Kendati total investasi di 2024 ini turun tipis 3%, penyesuaian investasi cukup menggembirakan karena baik jumlah proyek maupun penyesuaian modal masing-masing meningkat 11,2% dan 50,4% dibanding tahun 2023 (Vietnam Plus, 2025). Hal ini menunjukkan investor tetap memiliki kepercayaan tinggi terhadap iklim usaha di dalam negeri, sehingga terus meningkatkan investasi baru dan memperluas operasinya. Strategi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam tidak hanya mencerminkan praktik diplomasi formal, tetapi juga mengedepankan pendekatan diplomasi komersial yang selaras dengan prinsip diplomasi bambu.



Gambar 1. 1 Data Penanaman Modal Asing (FDI) Inflow Vietnam hingga 2022

Sumber : Data World Bank (2022)

Diolah kembali oleh penulis



Gambar 1. 2 Data Perbandingan Penanaman Modal Asing (FDI) Inflow Vietnam 2023 – 2024

Sumber: Ministry of Planning and Investment, Vietnam (2024)

Diolah kembali oleh penulis

Peningkatan FDI yang signifikan ini mencerminkan efektivitas prinsip diplomasi bambu Vietnam, yang menekankan fleksibilitas dan keseimbangan

dalam hubungan internasional. Dengan pendekatan ini, Vietnam berhasil menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara, termasuk Singapura, Amerika Serikat dan Tiongkok, tanpa terjebak dalam konflik geopolitik. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan *economic diplomacy* Vietnam dalam menarik investasi asing yang berkelanjutan.

Penelusuran literatur yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kajian akademik yang secara langsung menghubungkan prinsip diplomasi bambu dengan praktik diplomasi ekonomi Vietnam sebenarnya masih cukup terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada analisis transformasi kebijakan luar negeri Vietnam atau aspek teknokratis dari diplomasi ekonomi, tanpa membahas secara eksplisit hubungan antara nilai filosofis diplomasi bambu dan pelaksanaan strategi ekonomi luar negeri. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat memperkuat peran praktik diplomasi ekonomi terhadap perkembangan ekonomi Vietnam.

Dalam penguatan literatur mengenai hubungan antara kebijakan diplomasi ekonomi Vietnam dengan capaian ekonomi makro seperti perdagangan dan investasi asing, penting untuk meninjau kajian terbaru dari Binh dan Ha (2023) yakni *The role of economic diplomacy on Vietnam's economic development* serta Vu (2024) yakni *Vietnam's economic diplomacy: History, strategy and performance*. Dalam paparan mereka, diplomasi ekonomi Vietnam diidentifikasi sebagai salah satu dari tiga pilar utama diplomasi modern Vietnam bersama diplomasi politik dan budaya.

Ketiganya saling terkait dan berkontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri negara tersebut. Diplomasi ekonomi Vietnam sejak era reformasi ekonomi Đổi Mới (1986) hingga saat ini mengalami perkembangan yang progresif dan terstruktur. Strategi ini telah berhasil menjalin hubungan ekonomi dengan lebih dari 224 negara dan wilayah, termasuk penetrasi ke pasar-pasar ekspor baru serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas generasi baru seperti EVFTA (Thuy, 2022) dalam *Vietnam's export performance and FTAs: A closer look at the EU*

market. Diplomasi ekonomi juga secara aktif mendukung pertumbuhan FDI yang signifikan, dari USD 1,6 juta pada 1986 menjadi USD 38 miliar pada 2019, dan tetap stabil di angka USD 27,72 miliar pada 2022 meskipun dalam situasi pandemi global (Binh & Ha, 2023; General Statistics Office of Vietnam, 2023).

Temuan ini memperkuat posisi penelitian bahwa diplomasi ekonomi bukan hanya sebatas promosi investasi dan perdagangan, tetapi merupakan strategi menyeluruh yang menjadikan Vietnam sebagai pemain penting dalam rantai ekonomi global. Selain itu, kerja sama dengan mitra pembangunan utama seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa dalam bentuk ODA juga memperkuat kontribusi diplomasi ekonomi terhadap pembangunan sosial dan infrastruktur domestik (Dung, 2023) dijelaskan dalam *ODA policies and Vietnam's infrastructure development*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk membahas lebih dalam bagaimana prinsip diplomasi bambu sebagai landasan normatif kemudian diartikulasikan melalui praktik diplomasi ekonomi yang telah terbukti signifikan dalam mendukung pembangunan nasional Vietnam.

Salah satu kajian yang relevan ditulis oleh Chen dan Nguyễn (2024) dalam *Prospect Foundation*, berjudul *From the Blazing Furnace to Bamboo Diplomacy*. Artikel ini membahas peran Nguyễn Phú Trọng dalam mendorong transformasi politik dan ekonomi Vietnam melalui prinsip diplomasi bambu. Penulis menyoroti bahwa prinsip ini telah membentuk arah baru diplomasi Vietnam yang lentur namun kuat, serta memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan besar tanpa kehilangan kepentingan nasional. Meskipun tidak secara khusus membahas diplomasi ekonomi, tulisan ini memberikan dasar filosofis yang memperkuat posisi diplomasi bambu sebagai kerangka nilai kebijakan luar negeri Vietnam setelah tahun 2016.

Kemudian, menurut analisis strategis yang disusun oleh La Heras, Murphy, dan Ramos (2024) dalam *Vietnam Bamboo Holdings: Strong against the Winds of Multipolar World*, Vietnam terus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan menyeimbangkan

hubungan antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun ketegangan antara kedua negara terus meningkat, Vietnam tidak serta-merta berpihak kepada salah satu, melainkan mengedepankan strategi *hedging* untuk tetap menjaga otonomi strategisnya.

Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa prinsip *Four No's Policy* dan *bamboo diplomacy* menjadi fondasi utama dalam strategi kebijakan luar negeri Vietnam. Pendekatan ini memungkinkan Vietnam untuk mempererat kerja sama pertahanan tanpa harus mengubah posisi politik luar negeri utamanya secara signifikan. Strategi ini juga tercermin dalam kebijakan Vietnam terhadap Taiwan, di mana Vietnam tetap mematuhi kebijakan Satu Tiongkok sembari tetap menjalin kerja sama dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Lebih lanjut, analisis tersebut juga menekankan bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi di Vietnam. Oleh karena itu, meskipun beberapa reformasi politik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, hal tersebut tidak serta-merta mengarah pada transformasi sistem politik ke arah demokratisasi. Vietnam justru menitikberatkan pada liberalisasi ekonomi sembari mempertahankan stabilitas politik domestik.

Dalam kaitannya dengan diplomasi ekonomi, posisi Vietnam sebagai negara pelengkap dalam strategi *China plus one* menjelaskan pendekatan pragmatisnya dalam kerja sama ekonomi regional. Meskipun Vietnam belum mampu menggantikan posisi Tiongkok sebagai pusat manufaktur, negara ini terus mengembangkan sektor-sektor industri seperti tekstil, elektronik, dan manufaktur berteknologi tinggi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dengan diplomasi ekonomi Vietnam yang bertumpu pada penguatan kerja sama ekonomi global tanpa mengorbankan kedaulatan politik dan kebijakan luar negerinya.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya belum secara eksplisit menempatkan diplomasi bambu sebagai instrumen yang terintegrasi dalam praktik diplomasi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan kerangka nilai normatif (diplomasi bambu) dan kerangka analisis (trinitas diplomasi ekonomi menurut Okano-Heijmans) dalam konteks peningkatan FDI Vietnam tahun 2016–2025.

Perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Vietnam juga telah menjadi fokus berbagai penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks transformasi ekonomi pasca-reformasi *Đổi Mới* pada tahun 1986. Salah satu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Phung Thanh Quang, dkk (2022) berjudul *Investigating the determining factors of sustainable FDI in Vietnam* yang dimuat dalam jurnal *China Finance Review International* menganalisis pola FDI yang berkelanjutan di Vietnam menggunakan teori gravitasi dan pendekatan data panel untuk periode 2007–2020. Mereka menemukan bahwa pertumbuhan nilai FDI di Vietnam dipengaruhi secara positif oleh faktor politik dan sosial, globalisasi, serta *green energy consumption*. Penelitian ini fokus pada isu keberlanjutan (*sustainability*) dan strategi makroekonomi Vietnam, seperti konsumsi energi hijau, integrasi perdagangan, dan kebijakan fiskal.

Namun, penelitian ini tidak membahas dimensi diplomasi secara spesifik, terutama bagaimana kebijakan luar negeri Vietnam dengan prinsip diplomasi bambu dapat berperan dalam menciptakan iklim kondusif bagi arus investasi asing. Dalam hal ini, terdapat celah penting yang belum dieksplorasi, yaitu kurangnya pendekatan kajian hubungan internasional dan diplomasi dalam menjelaskan peran Vietnam sebagai aktor negara yang secara aktif membentuk lingkungan politik-ekonomi luar negeri yang mendukung FDI. Dalam hal ini, Quang et al. menganalisis akibat dari faktor-faktor struktural terhadap FDI, namun belum membahasa peran aktif pemerintah Vietnam dalam merancang strategi diplomasi luar negeri yang mampu menarik FDI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis terkait latar belakang yang membahas mengenai diplomasi bambu yang dilakukan oleh

pemerintah Vietnam, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi prinsip diplomasi bambu dalam strategi *economic diplomacy* oleh pemerintah Vietnam dalam meningkatkan *Foreign Direct Investment* tahun 2016 – 2024?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memenuhi persyaratan Pendidikan Sarjana Strata (S1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip diplomasi bambu sebagai bentuk *commercial diplomacy* oleh pemerintah Vietnam dalam upaya meningkatkan *foreign direct investment* (FDI) pada periode 2016 hingga 2024. Penelitian ini juga dilakukan untuk kepentingan akademis dan dalam rangka melengkapi *research gap* dalam penelitian sebelumnya terkait hubungan antara prinsip diplomasi bambu dan *commercial diplomacy* dalam upaya meningkatkan FDI.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan teoritis yang relevan dengan topik permasalahan sehingga dijadikan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis topik yang akan diteliti. Penulis melakukan tinjauan literatur dari beberapa jurnal penelitian yang dapat memperkuat kerangka teoritis. Kajian literatur disusun secara terstruktur ke dalam kerangka pemikiran sebagai acuan analisis dalam penelitian ini.

1.4.1 Economic Diplomacy

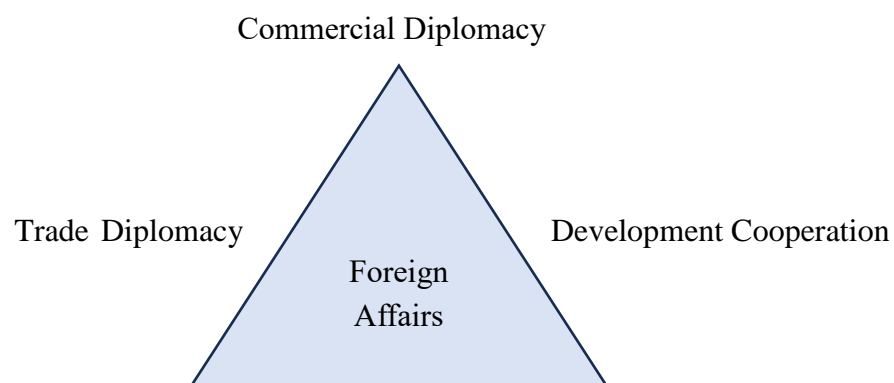
Dalam era hubungan internasional kontemporer, diplomasi tidak lagi terbatas pada isu politik dan keamanan, tetapi semakin berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional. Konsep ini dikenal sebagai *economic diplomacy*, yakni pemanfaatan instrumen diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi negara melalui kerja sama internasional. Maaïke Okano-Heijmans (2011) menjelaskan bahwa *economic diplomacy* mencakup spektrum aktivitas yang fleksibel dan kontekstual, tergantung pada alat kebijakan yang digunakan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai.

Economic diplomacy menjadi pendekatan utama yang digunakan negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional di ranah ekonomi global. Diplomasi jenis ini mencerminkan transformasi dari praktik diplomasi tradisional yang berfokus pada isu politik dan keamanan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi domestik dan keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional. Okano-Heijmans (2011) menjelaskan bahwa *economic diplomacy* mencakup upaya sistematis pemerintah dalam memfasilitasi dan memperkuat hubungan ekonomi lintas negara melalui promosi dagang, investasi, dan kerja sama pembangunan.

Economic diplomacy dijalankan melalui aktivitas konkret seperti penyediaan intelijen pasar dan teknologi, bantuan teknis terhadap isu-isu perdagangan dan akses pasar, serta fasilitasi pencarian mitra usaha dan pengembangan jaringan kerja sama ekonomi lintas batas. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh perwakilan diplomatik di luar negeri, tetapi juga oleh lembaga atau badan khusus di dalam negeri yang bertanggung jawab terhadap perdagangan luar negeri dan investasi. Dalam hal ini, keputusan pemerintah untuk memfokuskan perhatian pada negara atau wilayah tertentu sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam hubungan ekonomi yang dimiliki, termasuk keterlibatan pemerintah mitra dalam mendukung iklim investasi dan perdagangan.

Perluasan makna dan praktik dari economic diplomacy juga terlihat dari semakin kuatnya keterhubungan antara isu ekonomi dan isu non-ekonomi dalam perjanjian-perjanjian internasional. Dalam banyak kasus, agenda perdagangan internasional kini turut mencakup aspek pembangunan sosial, lingkungan, energi, hingga kerja sama teknologi dan pendidikan. Hal ini mencerminkan pergeseran bahwa economic diplomacy tidak lagi hanya menjadi domain kementerian perdagangan atau keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi luar negeri yang menyeluruh.

Dalam praktiknya, economic diplomacy dijalankan secara komprehensif melalui tiga bentuk utama, yakni diplomasi perdagangan, diplomasi komersial, dan kerja sama pembangunan. Ketiganya saling melengkapi dan sering kali tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara-negara berkembang, termasuk Vietnam, cenderung menggunakan ketiga pendekatan ini secara simultan sebagai respons terhadap kompleksitas tatanan ekonomi global. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, economic diplomacy menjadi kerangka pemikiran utama dalam menganalisis strategi diplomasi Vietnam, khususnya melalui prinsip *bamboo diplomacy*, yang dalam implementasinya mencerminkan sinergi antara ketiga bentuk diplomasi ekonomi tersebut.



Gambar 1. 3 Trinity in Economic Diplomacy

Sumber : Maaike Okano-Heijmans

Untuk memperjelas posisi *economic diplomacy* dalam keseluruhan spektrum, Okano-Heijmans menyusun dan mengelompokkannya menjadi beberapa kategori yang disebut sebagai *Trinity in Economic Diplomacy* yang kemudian merujuk pada tiga pilar utama yang membentuk pendekatan komprehensif dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi oleh suatu negara, yaitu: diplomasi perdagangan (trade diplomacy), diplomasi komersial (commercial diplomacy), dan kerja sama pembangunan (development cooperation). Ketiga pilar ini tidak hanya berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi, beririsan, dan memperkuat satu sama lain dalam mendukung tujuan nasional di ranah ekonomi internasional (Okano-Heijmans, 2011).

Dalam representasi visualnya, ketiga pilar ini digambarkan dalam bentuk segitiga yang menggambarkan posisi setara dan saling menguatkan antar elemen. Pendekatan segitiga ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang efektif memerlukan koordinasi dan integrasi dari ketiga bentuk tersebut, baik dalam tataran kebijakan maupun praktik lapangan.

Konsep trinitas ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi tidak dapat berjalan optimal apabila hanya bertumpu pada salah satu elemen saja. Negara-negara seperti Vietnam yang berhasil memanfaatkan peluang global dan menjaga keseimbangan hubungan internasional adalah contoh penerapan holistik dari trinitas *economic diplomacy*. Pendekatan ini juga sangat relevan dengan prinsip *bamboo diplomacy* yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia.

1.4.2 Trade Diplomacy

Trade diplomacy atau diplomasi perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam pendekatan *economic diplomacy* yang dikembangkan oleh Maaike Okano-Heijmans. Diplomasi ini merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh negara untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya melalui negosiasi perjanjian perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang,

serta pembukaan akses pasar bagi produk dan jasa domestik di luar negeri. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai aktor utama yang menghubungkan kepentingan nasional dengan dinamika perdagangan global melalui forum bilateral maupun multilateral.

Trade diplomacy mencerminkan bagaimana hubungan luar negeri dimanfaatkan secara strategis untuk menghapus atau mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, memperluas pangsa pasar ekspor, dan memperkuat posisi tawar negara dalam sistem perdagangan internasional. Negosiasi dagang menjadi elemen penting dari diplomasi ini, dengan tujuan membentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), hingga kerangka kerja perdagangan regional yang lebih luas seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Dalam praktiknya, diplomasi perdagangan juga melibatkan aktivitas lain seperti promosi ekspor, kerja sama teknis, dan advokasi kepentingan nasional dalam forum seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah melalui kementerian luar negeri, kementerian perdagangan, dan perwakilan diplomatik memainkan peran penting dalam mengadvokasi kepentingan ekonomi nasional di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif.

1.4.3 Commercial Diplomacy

Commercial diplomacy merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam praktik economic diplomacy menurut kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Maaike Okano-Heijmans. Dalam konteks ini, commercial diplomacy dipahami sebagai peran aktif yang dijalankan oleh pemerintah dalam memfasilitasi, mendukung, dan mengadvokasi kepentingan bisnis domestik di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing perusahaan nasional di pasar internasional melalui mekanisme diplomatik yang strategis dan terkoordinasi. Okano-Heijmans (2011) menjelaskan bahwa commercial diplomacy menekankan keterlibatan langsung negara dalam mendukung sektor swasta melalui promosi

perdagangan dan investasi, advokasi bisnis, serta penyediaan informasi pasar dan bantuan hukum di negara tujuan.

Berbeda dengan trade diplomacy yang berfokus pada negosiasi kebijakan antarnegara, commercial diplomacy cenderung bersifat lebih praktis dan teknis karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi mikro yang melibatkan pelaku usaha, baik dalam ekspor, investasi, maupun ekspansi pasar. Dalam praktiknya, aktivitas commercial diplomacy dapat dilakukan oleh berbagai institusi negara seperti kementerian luar negeri, kedutaan besar, atase perdagangan, serta lembaga promosi investasi yang memberikan layanan langsung kepada pelaku bisnis. Aktivitas ini mencakup penyediaan informasi pasar, penyelenggaraan forum bisnis bilateral, advokasi kepentingan perusahaan nasional, serta dukungan dalam penyelesaian hambatan perdagangan non-tarif.

Selain itu, commercial diplomacy juga sering dimanfaatkan untuk membangun citra positif negara sebagai mitra ekonomi yang kredibel dan stabil, sehingga dapat menarik minat investor asing. Seperti dijelaskan oleh Lee dan Hudson (2004), dalam dunia yang semakin kompetitif, negara dituntut untuk tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator aktif bagi para pelaku bisnis yang ingin menembus pasar global. Oleh karena itu, keberhasilan commercial diplomacy sangat dipengaruhi oleh kapasitas diplomatik negara, kualitas layanan yang diberikan kepada pelaku usaha, serta kemampuan dalam membangun jejaring dan kepercayaan di pasar internasional.

Dengan melihat peranannya yang strategis dalam meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi lintas negara, commercial diplomacy menjadi kerangka pemikiran yang relevan dan aplikatif untuk menganalisis dinamika hubungan ekonomi internasional suatu negara, termasuk dalam konteks strategi pembangunan nasional yang berbasis keterbukaan ekonomi dan diplomasi proaktif.

1.4.4 Development Cooperation

Development cooperation merupakan salah satu pilar penting dalam kerangka pemikiran economic diplomacy yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan internasional, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pengaruh, meningkatkan hubungan politik, serta membuka akses pasar dan investasi bagi negara pemberi bantuan. Dalam konteks ini, kerjasama pembangunan dipandang tidak sekadar sebagai praktik altruistik, tetapi sebagai strategi diplomasi ekonomi yang diarahkan untuk menciptakan kondisi eksternal yang mendukung pencapaian kepentingan nasional. Maaïke Okano-Heijmans (2011) menjelaskan bahwa development cooperation dalam economic diplomacy dapat digunakan dalam dua cara yang berbeda namun tidak saling meniadakan. Pertama, sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai politik seperti demokrasi, tata kelola yang baik, dan hak asasi manusia. Kedua, sebagai strategi untuk membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan menciptakan stabilitas politik serta pasar yang dapat diakses.

Pendekatan development cooperation telah banyak digunakan oleh negara-negara Eropa, di mana kegiatan bantuan pembangunan sering didelegasikan kepada lembaga non-pemerintah dan difokuskan secara geografis pada negara-negara berkembang, terutama di Afrika. Namun, dalam perkembangan terkini, negara-negara non-Barat seperti Vietnam, India, dan Tiongkok juga mengadopsi pendekatan serupa yang menyatukan bantuan pembangunan dengan promosi perdagangan dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara kerja sama pembangunan dan kepentingan ekonomi semakin kabur. Sebagaimana dicatat oleh Bayne dan Woolcock (2011), strategi pembangunan sekarang sering kali muncul dalam bentuk perjanjian kemitraan ekonomi yang mencakup isu-isu lintas sektor seperti energi, lingkungan hidup, teknologi, hingga pariwisata.

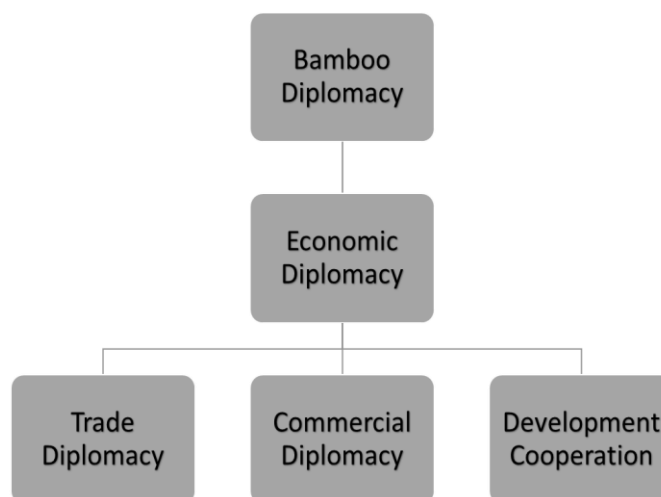
Dalam praktiknya, development cooperation melibatkan pemberian bantuan teknis, hibah, pinjaman lunak, dan dukungan kapasitas kelembagaan kepada negara mitra. Bantuan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas negara penerima, tetapi juga

menciptakan ketergantungan strategis yang dapat dimanfaatkan dalam forum diplomasi dan negosiasi multilateral. Negara pemberi bantuan juga memperoleh keuntungan berupa reputasi internasional, akses ke proyek-proyek infrastruktur, serta keterlibatan dalam pengaturan ekonomi regional.

Lebih lanjut, Lee dan Smith (2010) menekankan bahwa development cooperation merupakan bentuk soft power yang sangat efektif dalam membentuk opini internasional dan memperluas jaringan diplomasi negara. Dalam konteks globalisasi ekonomi, kerja sama pembangunan bukan lagi semata-mata praktik kemanusiaan, tetapi telah menjadi instrumen strategis untuk mempengaruhi kebijakan negara lain, membangun stabilitas regional, dan memperkuat daya saing ekonomi.

Oleh karena itu, development cooperation dalam kerangka economic diplomacy bukan hanya sekadar transfer sumber daya, melainkan juga bagian dari strategi kebijakan luar negeri yang menyatukan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis dalam suatu pendekatan yang lebih menyeluruh dan jangka panjang.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 4 Sintesa Pemikiran

Sumber: penulis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori economic diplomacy yang dikembangkan oleh Okano-Heijmans sebagai kerangka pemikiran utama. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, termasuk Vietnam yang berhasil menarik investasi asing secara signifikan dalam dekade terakhir. Economic diplomacy tidak hanya dipandang sebagai bagian dari strategi politik luar negeri, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama perdagangan, fasilitasi investasi, serta pembangunan bersama yang berbasis kepentingan timbal balik.

Dalam era global yang terus berubah akibat globalisasi, pergeseran kekuatan dunia, krisis geopolitik, serta isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim dan ketahanan energi, negara-negara dituntut untuk merespons dengan pendekatan diplomasi yang lebih fleksibel namun tetap strategis. Okano-Heijmans menjelaskan bahwa economic diplomacy adalah bentuk diplomasi yang tidak hanya melibatkan aktor negara, tetapi juga memfasilitasi keterlibatan aktor non-negara seperti sektor swasta dalam proses hubungan internasional. Meskipun demikian, negara tetap menjadi aktor utama dalam merancang kebijakan, mewakili kepentingan nasional, dan menjembatani hubungan antara dunia usaha dan pasar internasional.

Dalam praktiknya, economic diplomacy terdiri atas tiga cabang utama yang saling terintegrasi dan membentuk segitiga strategi, yaitu trade diplomacy, commercial diplomacy, dan development cooperation. Ketiga cabang ini bekerja secara sinergis sebagai instrumen pemerintah untuk memperkuat posisi ekonomi negara di ranah global. Trade diplomacy berkaitan dengan negosiasi dan penguatan kerja sama perdagangan, commercial diplomacy berfokus pada promosi investasi dan pendampingan sektor bisnis domestik di pasar internasional, sementara development cooperation berperan dalam menjalin kerja sama pembangunan yang memperluas pengaruh strategis dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Vietnam merupakan salah satu negara yang secara konsisten menerapkan strategi economic diplomacy dalam kerangka kebijakan luar negerinya. Hal ini

menjadi lebih nyata sejak tahun 2016, ketika Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, memperkenalkan konsep Bamboo Diplomacy. Prinsip ini merefleksikan sifat diplomasi Vietnam yang lentur dalam menghadapi tekanan eksternal namun berakar kuat pada kepentingan nasional. Filosofi ini kemudian diintegrasikan dalam strategi diplomasi ekonomi Vietnam, yang tercermin melalui pendekatan yang pragmatis dan multidimensional dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan berbagai negara, baik kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, maupun dengan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Afrika.

Keberhasilan diplomasi ekonomi Vietnam ini juga tidak dapat dilepaskan dari kerja sama Vietnam dengan mitra-mitra strategis di bidang ekonomi. Di satu sisi, Vietnam mampu memperkuat hubungan dagang dan investasi dengan Amerika Serikat melalui peningkatan akses pasar dan negosiasi tarif yang saling menguntungkan. Di sisi lain, Vietnam juga mempertahankan hubungan ekonomi erat dengan Tiongkok meskipun terdapat ketegangan politik di kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam mampu memainkan diplomasi ekonomi yang seimbang, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan dinamika geopolitik tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya.

Lebih jauh, strategi economic diplomacy Vietnam juga mencerminkan bentuk inovasi diplomasi modern, yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai inti dari perumusan kebijakan luar negeri. *Bamboo Diplomacy* tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga diterjemahkan ke dalam aksi nyata pemerintah Vietnam dalam menjembatani sektor publik dan swasta, membangun kerja sama pembangunan dengan negara mitra, dan memaksimalkan manfaat dari berbagai perjanjian perdagangan regional maupun global. Komitmen Vietnam terhadap kerja sama multilateral dan prinsip diversifikasi serta multilateralisasi hubungan luar negeri juga memperkuat posisi diplomasi ekonominya sebagai strategi utama pembangunan nasional.

Dengan menggunakan kerangka teori *economic diplomacy* dari Okano-Heijmans, penelitian ini menempatkan *Bamboo Diplomacy* sebagai nilai filosofis yang menopang strategi ekonomi luar negeri Vietnam. Pendekatan ini menjelaskan secara konseptual bagaimana integrasi antara nilai ideologis, strategi pragmatis, dan kebijakan konkret dapat menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan investasi asing, pertumbuhan perdagangan internasional, dan penguatan posisi strategis negara dalam sistem internasional yang semakin kompleks.

1.6 Argumen Utama

Pada penelitian ini, penulis berupaya menganalisis dan membuktikan bahwa prinsip diplomasi bambu yang diperkenalkan oleh Nguyen Phu Trong sejak tahun 2016 bukan sekadar pendekatan moral atau simbolik dalam kebijakan luar negeri Vietnam, tetapi merupakan landasan strategis yang dijalankan secara nyata melalui pendekatan diplomasi ekonomi. Pemerintah Vietnam secara aktif menerapkan prinsip tersebut melalui upaya promosi perdagangan dan investasi, advokasi kepentingan bisnis nasional, serta pembentukan citra negara yang bersahabat, ramah, fleksibel dan stabil di mata investor asing.

Berdasarkan kerangka teori *economic diplomacy* yang dikembangkan oleh Okano-Heijmans, penulis berargumen bahwa *economic diplomacy* merupakan instrumen utama yang digunakan Vietnam untuk menerjemahkan fleksibilitas diplomasi bambu ke dalam tindakan nyata di ranah hubungan ekonomi internasional. Kelima ekspresi utama dalam diplomasi komersial seperti promosi perdagangan, promosi investasi, advokasi bisnis, promosi pariwisata, dan promosi investasi yang bertanggung jawab secara sosial tercermin pada prinsip diplomasi bambu yang kebijakan dan aktivitas diplomatik Vietnam sepanjang periode 2016 hingga 2024.

Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa prinsip diplomasi bambu tidak hanya mencerminkan nilai-nilai normatif dan kultural yang dianut Vietnam, tetapi juga berfungsi sebagai strategi praktis yang mendorong peningkatan FDI melalui

jalur *economic diplomacy*. Strategi ini menunjukkan konsistensi arah kebijakan luar negeri Vietnam yang pragmatis, sekaligus menggambarkan bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan prinsip fleksibilitas dan keseimbangan dalam menghadapi dinamika ekonomi-politik global secara strategis.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi diplomasi Vietnam melalui pendekatan *Bamboo Diplomacy* dalam kerangka *economic diplomacy* sebagai bagian dari upaya peningkatan foreign direct investment (FDI) selama periode 2016 hingga 2025. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara mendalam berdasarkan sumber-sumber sekunder seperti dokumen kebijakan, laporan resmi, artikel akademik, dan data statistik yang relevan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan rentang waktu dari tahun 2016 hingga 2024 sebagai batasan temporal penelitian. Tahun 2016 dipilih sebagai titik awal karena pada tahun tersebut Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, secara resmi memperkenalkan prinsip diplomasi bambu sebagai arah baru kebijakan luar negeri Vietnam. Prinsip ini menjadi simbol dari pendekatan diplomatik Vietnam yang fleksibel namun berakar kuat pada kepentingan nasional, dan telah menjadi dasar dari strategi diplomasi ekonomi Vietnam selama hampir satu dekade terakhir.

Rentang waktu ini dipandang memadai untuk mengamati secara deskriptif bagaimana implementasi prinsip diplomasi bambu dalam praktik *economic diplomacy* Vietnam, khususnya dalam menarik foreign direct investment (FDI). Pemilihan tahun 2024 sebagai batas akhir penelitian didasarkan pada fakta bahwa tahun tersebut mencatat realisasi FDI tertinggi sepanjang sejarah Vietnam, yaitu

mencapai USD 38,2 miliar, seperti dilaporkan oleh Vietnam Foreign Investment Agency. Angka ini mencerminkan keberhasilan strategi diplomasi ekonomi Vietnam dalam mempertahankan kepercayaan investor internasional di tengah situasi geopolitik yang dinamis dan pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Selain itu, pada periode 2020 hingga 2022, Vietnam mengalami tekanan signifikan akibat pandemi global. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Vietnam justru menunjukkan rebound yang kuat dalam hal arus investasi asing. Oleh karena itu, periode 2016–2024 tidak hanya mencakup fase perumusan dan implementasi awal kebijakan, tetapi juga mencakup fase penguatan dan puncak keberhasilan diplomasi ekonomi Vietnam, yang menjadikannya ideal untuk dikaji secara deskriptif.

Dengan kerangka waktu ini, penulis dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana strategi diplomasi ekonomi Vietnam melalui pendekatan diplomasi bambu mampu berkontribusi pada peningkatan FDI dan memperkuat posisi negara tersebut di kancah ekonomi kawasan dan global.

Dalam lingkup ruang dan wilayahnya, penelitian ini berfokus pada aktivitas diplomasi Pemerintah Vietnam di tingkat bilateral dan multilateral yang berkaitan dengan upaya peningkatan investasi asing langsung (FDI). Lingkupnya mencakup interaksi Vietnam dengan negara-negara mitra dagang dan investasi utama, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Penelitian ini juga meninjau kebijakan luar negeri Vietnam secara institusional, melalui peran Kementerian Luar Negeri, Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), serta perwakilan diplomatik Vietnam di luar negeri sebagai pelaksana strategi *economic diplomacy*.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Peneliti mengumpulkan data sekunder yang relevan dari berbagai literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi

pemerintah dan organisasi internasional (misalnya UNCTAD, OECD), artikel berita, serta dokumen kebijakan yang membahas diplomasi ekonomi Vietnam, prinsip diplomasi bambu, dan aliran FDI ke Vietnam. Data ini kemudian dianalisis untuk menelusuri hubungan antara strategi diplomasi Vietnam dan tren investasi asing selama periode 2016–2025. Teknik pengumpulan data ini juga mencakup penelusuran dokumen primer dari institusi resmi Vietnam, seperti Kementerian Luar Negeri dan Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), sebagai bahan penunjang analisis.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menafsirkan dan memahami data non-numerik secara sistematis guna menjawab rumusan masalah dan mendukung argumen utama penelitian. Penulis akan menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti dokumen kebijakan resmi pemerintah Vietnam, laporan dari organisasi internasional, jurnal akademik, serta berita dan arsip diplomatik.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pengumpulan data relevan dari berbagai sumber kredibel dan terverifikasi, yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Vietnam, prinsip diplomasi bambu, *economic diplomacy*, dan tren *foreign direct investment* (FDI) selama periode 2016–2025. Kedua, data yang telah dikumpulkan kemudian melalui proses klasifikasi dan kategorisasi, yakni dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti bentuk-bentuk ekspresi *commercial diplomacy* (akan lebih difokuskan terhadap ekspresi yang secara empiris lebih menonjol dan dominan yakni promosi perdagangan dan promosi investasi), peran institusi negara, serta dampaknya terhadap peningkatan FDI.

Ketiga, peneliti melakukan analisis interpretatif, yaitu menafsirkan hubungan antara strategi diplomasi bambu yang dijalankan oleh Vietnam dengan bentuk

implementatif dari trinitas economic diplomacy berdasarkan lima ekspresi utama yang dijelaskan oleh Okano-Heijmans (2013). Keempat, dilakukan perbandingan dan penarikan pola antara tren FDI dan aktivitas diplomatik Vietnam dalam konteks hubungan bilateral dan regional, untuk memahami korelasi antara kebijakan dan hasil yang dicapai.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan validasi logis terhadap temuan, yaitu dengan menautkan hasil analisis ke dalam kerangka teoritis serta menjawab pertanyaan penelitian. Dalam proses ini, teori *economic diplomacy* menjadi alat bantu untuk melihat bagaimana praktik diplomatik Vietnam secara strategis diarahkan untuk mendukung tujuan ekonomi nasional.

1.7.4 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan untuk menentukan rancangan pembahasan agar dapat terorganisir, sehingga dapat memberikan kemudahan untuk dipahami. Penulis menjelaskan penelitian ini ke dalam empat bab, yakni dengan menggunakan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

BAB I Bab ini merupakan dasar awal dari keseluruhan penelitian. Di dalamnya dipaparkan latar belakang masalah yang menjelaskan konteks, urgensi, serta signifikansi penelitian mengenai penerapan prinsip diplomasi bambu oleh Pemerintah Vietnam. Selanjutnya dirumuskan masalah penelitian secara eksplisit yang menjadi fokus utama kajian, diikuti dengan tujuan penelitian dan kontribusi yang ingin dicapai. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran yang menguraikan landasan teori *economic diplomacy* dan *commercial diplomacy* menurut Okano-Heijmans sebagai alat analisis utama. Sintesa pemikiran dijelaskan untuk menyatukan teori dan konteks studi kasus, yang kemudian mengarah pada argumen utama penelitian. Di bagian akhir, dijelaskan metode penelitian yang mencakup pendekatan, metode pengumpulan dan analisis data, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan ini sendiri.

BAB II Bab ini membahas secara khusus mengenai bagaimana prinsip Bamboo Diplomacy diterapkan dalam strategi diplomasi perdagangan (trade diplomacy) Vietnam. Pembahasan mencakup upaya Vietnam menjalin dan memperkuat perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, perluasan pasar ekspor, serta bagaimana Vietnam menjaga keseimbangan hubungan dagang dengan negara-negara utama di tengah tekanan geopolitik global. Bagian ini juga menjelaskan kontribusi trade diplomacy dalam menarik arus perdagangan dan investasi asing.

BAB III Bab ini menjelaskan bagaimana prinsip Bamboo Diplomacy Vietnam diimplementasikan dalam dua pilar lainnya dari economic diplomacy, yaitu commercial diplomacy dan development cooperation. Pada bagian commercial diplomacy, akan diuraikan strategi promosi investasi, perlindungan bisnis, dan fasilitasi perusahaan nasional untuk ekspansi internasional. Sementara pada bagian development cooperation, dibahas bagaimana kerja sama pembangunan dan penerimaan bantuan luar negeri diarahkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

BAB IV Bab ini memuat simpulan dari keseluruhan proses penelitian, yang dirumuskan berdasarkan temuan dan analisis pada bab sebelumnya. Simpulan ditulis secara ringkas dan menjawab pertanyaan utama penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran akademis maupun praktis, serta kemungkinan arah pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan studi diplomasi ekonomi, komersial dan investasi asing.